

# THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN WADUNGASIH VILLAGE, BUDURAN DISTRICT, SIDOARJO REGENCY

## [EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA WADUNGASIH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO]

Reni Allysa Putri Faradina<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The following study aims to describe and evaluate the Effectiveness of the Family Hope Program in Wadungasih Village. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The selection of informants was carried out by purposive sampling, consisting of Beneficiary Families (KPM) and PKH Companions of Wadungasih Village as those responsible for the Family Hope Program. The results of the study indicate that the effectiveness of the Family Hope program in Wadungasih Village, Buduran District, Sidoarjo Regency has not fully achieved its goals because in the implementation of the Family Hope Program, the Apparatus is still unable to implement the program properly in understanding the program. Inaccuracy of targets in receiving PKH assistance. PKH Companions still have several obstacles that prevent them from achieving these goals. This makes the effectiveness of the family hope program in Wadungasih Village not yet effective.*

**Keywords** – effectiveness; government programs; family hope programs

**Abstrak.** *Penelitian berikut ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendamping PKH Desa Wadungasih sebagai penanggung jawab Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya mencapai tujuannya karena dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Aparatur masih belum mampu melaksanakan program dengan baik dalam memahami program. Ketidaktepatan sasaran dalam menerima bantuan PKH. Pendamping PKH masih memiliki beberapa kendala yang menyebabkan mereka tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Hal ini menjadikan efektivitas program keluarga harapan di Desa Wadungasih belum efektif.*

**Kata Kunci** – efektivitas; program pemerintah; program keluarga harapan

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan bersifat global dan hingga saat ini tetap menjadi isu utama di berbagai negara. Masalah ini adalah gangguan sosial-ekonomi yang juga dialami oleh negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sebagian besar didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga, ternyata belum mampu menghasilkan kualitas pertumbuhan yang cukup baik untuk secara signifikan mengurangi angka kemiskinan serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Di samping itu, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks Indonesia, upaya mengatasi kemiskinan telah menjadi prioritas utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia telah berusaha menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam penanganan kemiskinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai program dan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial[1]. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterpaduan antar sektor, peran masyarakat, dan partisipasi aktif pemerintah dalam

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

menciptakan solusi yang efektif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjadi acuan bagi pengembangan program-program sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan[2].

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan perlindungan sosial[3]. PKH menargetkan keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga dengan kriteria tertentu, dengan harapan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih baik, terutama dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial di Indonesia, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH)[2]. Untuk dapat menerima bantuan dari PKH, terdapat sejumlah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Pertama, calon penerima harus merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) dengan memiliki KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. Kedua, harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), ketiga penerima PKH harus berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, yang ditentukan berdasarkan berbagai indikator seperti penghasilan rendah, tempat tinggal tidak layak, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Calon penerima juga dinyatakan tidak boleh berasal dari golongan masyarakat yang mampu, seperti pegawai negeri, TNI/Polri, pensiunan, atau keluarga dengan aset bernilai tinggi (mobil, motor mahal, listrik rumah di atas 2.200 VA).

Dengan berbagai regulasi tersebut, kemiskinan tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi untuk melalui kebijakan yang strategis, memperkuat program bantuan sosial, dan menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan demikian, penanganan kemiskinan dapat menjadi langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,78% atau 26,42 juta penduduk, hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak kemiskinan terhadap struktur sosial dan pembangunan negara[4]. Ketika angka kemiskinan meningkat menjadi 10,14% pada tahun 2021, hal ini semakin menggaris bawahi bagaimana tingginya kemiskinan dapat menghambat kemajuan pembangunan. Namun, terdapat harapan dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,54% di tahun 2022 dan 9,36% pada tahun 2023, yang menunjukkan respons positif terhadap penanganan kemiskinan. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dapat memberikan dampak yang signifikan, meskipun tantangan masih harus dihadapi untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan dalam kesejahteraan masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, dan mendukung kesehatan ibu dan anak[5]. Bentuk bantuan yang diberikan melalui PKH ini meliputi bantuan tunai langsung yang disalurkan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat. PKH juga dilengkapi dengan program pendampingan untuk membantu penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan secara efektif dan merencanakan peningkatan kesejahteraan mereka di masa depan.

Dalam konteks tersebut, berikut ini perkembangan jumlah Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan dan dampak program ini kepada masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo**

No	Tahun	Pengajuan PKH	Penerima PKH
1.	2021	44.742	38.669
2.	2022	48.986	44.143
3.	2023	53.045	49.521

*Sumber: Pendamping PKH Desa Wadungasih, 2024*

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Perkembangan Jumlah Program Keluarga Harapan di kabupaten Sidoarjo di atas, dapat dilihat bahwa terjadi adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengajuan PKH dengan jumlah penerima manfaat PKH, hal ini dikarenakan terdapat proses verifikasi data dan validasi data, selain itu juga terdapat beberapa kriteria khusus seperti kondisi ekonomi, status keluarga, dan jumlah anggota keluarga, sehingga jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka permohonan PKH tidak akan disetujui.

Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami kenaikan secara drastis, dan terdapat ketidaksesuaian antara pengajuan dan penerima Program Keluarga Harapan. Ketidakesesuaian paling besar terjadi pada tahun 2021 dengan data penerima sejumlah 44.742 penerima tetapi realita penerimanya sejumlah 38.669. Terjadi selisih ketidaksesuaian data sejumlah 6.073. Meskipun mengalami kenaikan yang signifikan dalam jumlah pengajuan Program Keluarga Harapan, terdapat tantangan yang dihadapi dalam mencocokkan jumlah pengajuan dengan jumlah penerima yang sebenarnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih, berikut adalah tabel yang menunjukkan data pengajuan dan penerima PKH dari tahun 2021 hingga 2023.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih**

No	Tahun	Pengajuan PKH	Penerima PKH
1.	2021	93	87
2.	2022	76	71
3.	2023	65	57

*Sumber: Pendamping PKH Desa Wadungasih, 2024*

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah pengajuan PKH mencapai 93, sementara jumlah penerima yang disetujui sebanyak 87 orang. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pengajuan menurun menjadi 76 dan penerima juga berkurang menjadi 71 orang, penurunan ini bisa disebabkan oleh perubahan jumlah keluarga yang memenuhi syarat. Dan tahun 2023 terjadi penurunan dengan jumlah pengajuan sebanyak 65 dan penerima sebanyak 57, penurunan ini

mengindikasikan penyaringan yang lebih ketat atau adanya perubahan kondisi sosial ekonomi di Desa Wadungasih. Namun, pada proses seleksi yang ketat ini masih terjadi ketidak tepat sasaran dan tidak adanya transparan dari pemerintah. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas program keluarga harapan. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana sebuah program diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya, sehingga penerima manfaat dapat merasakan dampak positif secara langsung. Hal ini juga melibatkan pemahaman menyeluruh dari masyarakat terhadap program tersebut untuk memastikan penerimaan yang optimal dan transparansi pelaksanaannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep efektivitas, terdapat beberapa indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Indikator pemahaman program yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah bagaimana sebuah program diimplementasikan agar mempermudah pemahaman dan penerimaan oleh pengguna. Sejumlah penelitian sebelumnya dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan konsep efektivitas. Penelitian pertama yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tegal, penulis menyimpulkan bahwa masih mengalami banyak kendala. Seperti, sosialisasinya kurang menyeluruh sehingga kurang mendapatkan dukungan dari pihak terkait[6]. Pendataan peserta PKH belum menyeluruh, serta pendampingan belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana PKH oleh KPM kerap digunakan diluar ketentuan. Serta penelitian kedua dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis (2020), penulis menyatakan bahwa kurangnya pemahaman program yang kurang dipahami oleh masyarakat[7]. Penerima PKH belum efektif karena belum memenuhi kriteria Kementerian Sosial dan adanya ketidak tepat sasaran dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan. Dan penelitian ketiga yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Camplagan Kabupaten Polewali Mandar yang penulis melihat kriteria program tepat sasaran masih belum mencakup dalam pemanfaatan keluarga penerima dan belum efektif[8].

Permasalahan dari ketiga penelitian tersebut sama halnya dengan permasalahan PKH di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran antara lain seperti, terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pengajuan program keluarga harapan, pencairan bantuan mengalami keterlambatan atau digabungkan dengan jadwal pencairan selanjutnya, dan adanya ketidaktepatan sasaran penerima program keluarga harapan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bertujuan untuk memaparkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai subjek penelitian. Peneliti ini berupaya mengungkap realitas yang ada di lapangan terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih. Dengan adanya fokus penelitian maka batasan masalah menjadi lebih jelas dan pelaksanaan penelitian tidak meluas. Fokus penelitian kualitatif didasarkan pada observasi, penelitian terdahulu, serta kajian yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah kajian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Model pendekatan yang digunakan untuk mengkaji efektivitas tersebut sesuai dengan yang dikemukakan dalam literatur, dengan mengamati faktor-faktor yang relevan [9]. Terdapat lima indikator yang

mempengaruhi efektivitas serta menjadi fokus penelitian untuk mengukur Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yaitu: a. Pemahaman Program b. Tepat Sasaran c. Tepat Waktu d. Tercapainya Tujuan e. Perubahan Nyata. Penelitian ini dilakukan di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena di wilayah tersebut teridentifikasi adanya indikasi permasalahan yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan Informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu [10]. Dalam penelitian ini terdapat informan yang terdiri dari Pendamping PKH Kecamatan Buduran sebagai *Key Informan* dan keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai *informan*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Penelitian ini mengadopsi model analisis yang mencakup tahapan pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan dalam literatur [11]. Reduksi data melibatkan proses penyaringan atau pemilihan data yang diperoleh selama pengumpulan untuk memastikan relevansi. Setelah itu, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang terpilih secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan interpretasi dari data yang telah diolah sesuai dengan permasalahan penelitian [12].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan temuan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ternyata ditemukan beberapa kendala yang ada dalam keefektifan program PKH tersebut. Dalam menganalisis dan mendeskripsikan berbagai kendala dalam efektivitas program, peneliti menggunakan lima indikator yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas program yang diungkapkan oleh peneliti [9]. Lima indikator tersebut yaitu pemahaman waktu, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Penjelasannya sebagai berikut:

#### Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan salah satu indikator efektivitas yang dimaksudkan bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami [9]. Keberhasilan sebuah program dapat ditentukan dari intensnya sosialisasi maupun pembinaan yang dilakukan oleh pihak pendamping PKH Desa Wadungasih yang ditunjuk sebagai tim koordinasi jalannya sebuah program, dengan adanya sosialisasi maka akan terjadi satu pemahaman yang sama dari pengetahuan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Berikut informasi hasil wawancara peneliti bersama Ibu pendamping PKH yang bertanggung jawab sebagai pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 1**  
**Sosialisasi di rumah Keluarga Penerima Manfaat**



“Saya sebagai pendamping PKH ya sangat paham tentang PKH ini mbak, sudah 3 tahun saya jadi pendamping PKH di Desa Wadungasih ini. Dari syarat-syaratnya, teknis pendistribusiannya saya sudah paham betul tentang PKH ini, jadi saya bisa ngejelasinnya ke masyarakat apa itu PKH. Dan menurut saya masyarakat ini sudah sangat paham ya mbak, karena saya sempat memberikan penjelasan tentang apa itu PKH. Hal itu saya sampaikan pada saat pertemuan perama dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan lolos dan menerima.” (wawancara 7 Oktober 2024).

Hal sebaliknya disampaikan oleh Warga Desa Buduran selaku Keluarga Penerima manfaat (KPM 1). Beliau mengatakan:

“Mungkin kalo saya sendiri mbak ya belum paham mengenai PKH ini, agak bingung cara pengajuannya soalnya aparat desa Cuma bilang kalo ada bantuan buat yang kurang mampu namanya PKH, gitu aja. Pendamping itu kalo mau perkumpulan juga jarang mbak, kadang 2 bulan sekali jadi nek ada info apa-apa gitu ya lama mbak nyampeknnya ke kita. Rumah petugasnya sama rumah saya aja juga jauh”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Hal tersebut diperkuat oleh (Ibu KPM 2) sebagai berikut:

“iya mbak, cara pengajuannya gimana saya belum paham, petugasnya cuma nawarin bantuan buat anak sekolah, terus nek ada info tentang bantuan kita dapet e dari tetangga, tetangga ya gitu dapete dari yang lain bukan petugas atau aparat desanya”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Wadungasih dapat diketahui bahwa terkait pemahaman program oleh masyarakat Penelitian di Desa Wadungasih menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan efektif jika dilihat dari indikator pemahaman masyarakat. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami secara jelas persyaratan dan teknis pendistribusian bantuan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pendamping PKH serta faktor geografis yang mempersulit komunikasi langsung antara aparat desa dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Tegal juga menghadapi kendala serupa, seperti sosialisasi yang tidak menyeluruh, pendampingan yang belum optimal, serta penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan [6]. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya peran pendamping dan sosialisasi dalam meningkatkan efektivitas program PKH.

### **Tepat Sasaran**

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya[13]. Program dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila program yang dijalankan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan target semestinya. Keberhasilan sebuah program dapat ditentukan dari hasil yang sesuai dengan apayang direnakan sebelumnya yang seharusnya dilakukan oleh pihak pendamping PKH Desa Wadungasih yang ditunjuk sebagai tim koordinasi jalannya sebuah program. Ibu pendamping KPM Desa Wadungasih mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sih terkait tepat sasaran atau engganya itu ya sudah tepat mbak, soalnya kan itu udah diseleksi. Tapi kalau menemui penerima yang menyalahgunakan atau ternyata mereka mampu ya langsung digraduasi, graduasi itu seperti mereka diajukan ke dinas karena sudah mampu biar ngga dapet PKH lagi. Saya jelaskan sekali lagi, bahwa KPM sudah dipilih dengan tepat melalui proses seleksi. Jika dikemudian hari penerima sudah dirasa mandiri atau ada yang

menyalahgunakan PKH mereka bisa saya usulkan untuk diberhentikan dari bantuan itu”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Adapun respon dari warga Wadungasih selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM 1) mengatakan:

“Kalau kesesuaian itu aslinya ada yang ngga sesuai mbak, hanya saja pendamping PKHnya terlalu sibuk jadi ya hanya diseleksi saja. Ya memang ada perkumpulan antara pendamping dengan KPM tapi ya ga setiap saat dan kurang efisien sih mbak. Mengingat pendamping kayak gitu dan menurut saya tidak tepat sasaran itu ada buktinya. Orang sebelah yang kerja di salah satu pabrik yang lumayan besar dan dia itu uny mobil sebenarnya mbak, kan kalau dia kerjanya di pabrik yang lumayan besar dan punya mobil berarti harusnya dia mampu kenapa kok dapat PKH”. (wawancara 7 Oktober 2024).

**Tabel 3.1**  
**Nama Keluarga Penerima Manfaat Desa Wadungasih Kecamatan Buduran**  
**Kabupaten Sidoarjo**

NO	NAMA	NO	NAMA
1	DEWI MUNSITI	30	SUWARSIH
2	KUSMIATI	31	KODERI
3	RUMIYATEN	32	KAMTI
4	SITI AMINAH	33	SUPRIYANTO
5	SITI KHODIJAH	34	KATIDAMAYANTI
6	UMI KULSUM	35	MAISAH
7	SUMIYATI	36	MARNI
8	SURATMI	37	SUKARNI
9	WAHYU USUMA MARDANI	38	SITI SHOFIYAH
10	HAYATI	39	GUSTIN MRIAWATI
11	ASMAUL KHUSNAH	40	SITI
12	CITRA AWANGSARI	41	JUWARIYAH
13	WARSINI	42	ILUL SHOFLANA
14	KASMINEM	43	YUNI PURWANTI
15	ANDRIYANI	44	MULIATI
16	SUPIYAH	45	KALIMAH
17	KASENI	46	MARLIAH
18	RINI	47	RUKANTI
19	PUJI RIYANTI NINGSIH	48	CHOLIFAH
20	MASLACHAH	49	MUAWANAH
21	DEWI	50	SAMIN
22	MUNIR	51	KOLILIK
23	RODIYAH	52	KOIRUL ANAM
24	ENDANG G	53	ROSIDIANTI
25	WIWIK LE	54	FARIDA ANI
26	LISA ENDANG	55	RICKY TRISNA
27	KASIDI	56	RONI GEL
28	PAIDI	57	LINDA SRI
29	MULYONO		

Hasil penelitian di Desa Wadungasih menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan efektif jika dilihat dari indikator tepat sasaran. Beberapa warga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata,

sementara sosialisasi yang minim menyebabkan rendahnya pemahaman KPM terhadap teknis program. Meskipun pendamping telah mengajukan data penerima, kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Desa Bojongmalang, yang juga menyimpulkan bahwa PKH belum tepat sasaran karena masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program akibat kurangnya sosialisasi[7].

### **Tepat Waktu**

Keberhasilan efektivitas diukur melalui ketepatan waktu pelaksanaan[9]. Dalam pelaksanaannya, ketepatan waktu Program Keluarga Harapan Desa Wadungasih ini sudah mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat desa dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Ketepatan waktu pelaksanaan juga merupakan indikator penting dalam efektivitas program. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mencapai sasaran yang telah ditentukan merupakan bagian dari indikator ini sebagaimana dijelaskan dalam literatur [15]. Mengenai cepat dalam pelaksanaan pembagian program keluarga harapan di Desa wadungasih, Ibu pendamping KPM mengatakan dalam wawancara tersebut:

“Sudah cukup cepat mbak karena kalo PKH bantuannya itu langsung transfer, jadi langsung ke ATMnya, dan ATMnya dibawah masing masing penerima. Sesudah pusat informasi terkait pencairan dana, saya sebagai pendamping KPM langsung memberi arahan di dalam grup *whatsapp* untuk segera mengecek dan mengambil untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Terkait pendamping maupun perangkat semuanya gaboleh bawa ATM KPM, jadi tugas saya sebagai pendamping hanya benar benar mendampingi saja”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Adapun respon dari warga Desa Wadungasih selaku (PKM 1):

“Sudah cepat ya mbak, jika ada informasi langsung di *share* melalui grup dan kalo ada warga yang gapunya hp langsung dikasih informasi *door to door*. Alhamdulillah selalu cepat dan tepat waktu, kan itu biasanya bertahap kalau pun bulan ini kita ga dapet nanti ada info bulan depan tapi ya gimana mbak sebenarnya kita perlu jadi ya kalau ada keterlambatan. Kita menyadari itu”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Wadungasih, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tidak efektif karena pencairan bantuan dilakukan belum tepat waktu dalam empat tahap setiap tahun sering terjadi penggabungan pencairan sehingga program berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan penelitian lain di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, yang juga menemukan pencairan bantuan tepat waktu, namun efektivitas program secara keseluruhan masih belum optimal[8]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu pencairan bantuan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan PKH, meskipun efektivitas program juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lain dalam pelaksanaannya.

### **Tercapainya Tujuan**

Tercapainya tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai[16]. PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Bantuan tunai ini dapat digunakan untuk membayar biaya kesehatan, membeli obat-obatan, atau memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Dengan demikian, PKH berkontribusi pada peningkatan akses dan pemenuhan



kebutuhan kesehatan keluarga miskin. PKH juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mencari penghidupan.

Terkait jaminan terhadap PKH di Desa Wadungasih akan dijelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendamping KPM. Sebagaimana beliau mengatakan:

“Terkait jaminan tentang program PKH ini ngga bisa dikatakan menjamin sih mbak, soalnya kan ini ngga bisa dijadikan keuangan utama mereka. Tapi kembali lagi ke KPM nya ada yang menjamin ada yang ngga, soalnya biaya ekonomi setiap masyarakat itu berbeda-beda mbak”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh penerima (KPM 1), beliau mengatakan:

“Kalau jaminan sih ngga ya mbak, kembali ke masyarakatnya masing-masing soalnya ya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda tergantung perekonomiannya. Tapi kalo saya sih sudah cukup menjamin di keluarga saya, daripada saya ga dapet sama sekali dan kalo menjamin itu tergantung gimana si penerima (KPM) mengelolanya”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Hal lain disampaikan oleh Penerima Keluarga Manfaat (KPM2):

“Belum puas mbak kalo saya, soalnya ya itu tadi sosialisasinya agak molor. Jadi kalo bicara puas saya puasnya ya dapat bantuannya itu. Namanya juga kebutuhan banyak mbak, jadi kalo dapet ya alhamdulillah. Tapi nek soal puas sama pendampingnya ya belum puas”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Wadungasih, Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai tujuannya dengan berhasil membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya mendukung anak-anak agar tetap dapat bersekolah dan melanjutkan kehidupan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, yang menyatakan bahwa PKH sudah memberikan dukungan nyata kepada penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga kelangsungan pendidikan anak-anak bahwa PKH sudah memberikan dukungan nyata kepada penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga kelangsungan pendidikan anak-anak[8]. Dengan demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam efektivitas pelaksanaan, tujuan utama PKH dalam membantu penerima tetap tercapai.

### **Perubahan Nyata**

Perubahan adalah hal yang diharapkan dalam suatu program. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan sesudahnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran dari program tersebut[9]. Perubahan nyata dalam program keluarga harapan (PKH) adalah sejauh mana tingkat keberhasilan PKH dalam mewujudkan perubahan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat menjadi PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin [17]. Untuk melihat kualitas program PKH di Desa Wadungasih akan dijelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu pendamping KPM, sebagai berikut:

“Lewat program PKH ini pendamping seperti saya juga merasa bahwa program PKH dapat meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kegiatan monitoring yang saya lakukan pada saat pertemuan kelompok PKH”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Warga Desa Wadungasih sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM 1) sebagai berikut:

“Program PKH ini berkualitas apabila pendamping dan penerima PKH seperti saya ini bisa bekerja sama dengan baik mbak, jadi kalo kontribusi dari masyarakat atau pendamping PKHnya kurang ya gabisa berkualitas. Tapi saya sendiri merasakan kualitas program dengan skill-skill yang udah dikasih sama pendamping”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Dampak yang sama juga dirasakan oleh Ibu (KPM2), beliau mengatakan bahwa:

“Ada mbak, dampaknya ya program PKH ini bisa membantu anak-anak sekolah disini buat melanjutkan pendidikannya. Terutama anak-anak yang masih SD,SMP,SMA. Terus kita juga dapat skill yang bisa dipakai buat buka usaha biar ga terus-terusan bergantung sama bantuan PKH”. (wawancara 7 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif yang nyata bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Wadungasih. Program ini berhasil menumbuhkan harapan bagi KPM untuk menjalani kehidupan yang lebih layak serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, yang juga menunjukkan bahwa PKH berhasil membantu penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak[8]. Dengan demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima dan pendidikan anak-anak telah tercapai di kedua lokasi. Jika dianalisis menggunakan model Efektivitas menurut Sutrisno (dalam Wulandari 2018:16) pada indikator tercapainya tujuan maka penerapan Program Keluarga Harapan Desa Wadungasih dapat dinilai bahwa program tersebut belum berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan kurang adanya pendampingan dan pengarahan informasi dari petugas PKH Desa Wadungasih kepada KPM. Petugas atau pendamping PKH dirasa belum cukup memuaskan para KPM karena pengarahan informasi dan pendampingan terkesan lama. Hal itu juga yang menjadi kendala dalam tujuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Wadungasih.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian di Desa Wadungasih menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan efektif jika dilihat dari indikator pemahaman masyarakat. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami secara jelas persyaratan dan teknis pendistribusian bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan efektif jika dilihat dari indikator tepat sasaran, karena beberapa warga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata, sosialisasi yang minim menyebabkan rendahnya pemahaman KPM terhadap teknis program, pelaksanaan ketepatan waktu Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tidak efektif karena pencairan bantuan dilakukan belum tepat waktu dalam empat tahap setiap tahun sering terjadi penggabungan pencairan sehingga program berjalan lancar. Pada indikator tercapainya tujuan telah mencapai tujuannya dengan berhasil membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya mendukung anak-anak agar tetap dapat bersekolah dan melanjutkan kehidupan. Perubahan Nyata sudah memberikan dampak positif yang nyata bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Wadungasih. Program ini berhasil menumbuhkan harapan bagi KPM untuk menjalani kehidupan yang lebih layak serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan alhamdulillah terimakasih atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Wadungasih, pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Wadungasih, dan Keluarga Penerima Manfaat Desa Wadungasih karena telah berkontribusi dan menjadi lokasi penelitian yang dilakukan penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan semangat dari awal hingga akhir, kepada sahabat dan teman-teman yang mengiringi perjalanan penulis, terima kasih atas dukungan, motivasi yang telah dicurahkan.

## REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, “UU No. 13 Tahun 2011,” 2011, *Jakarta*. Accessed: Jul. 29, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>
- [2] Republik Indonesia, “UU No. 11 Tahun 2009,” Jan. 16, 2009, *Jakarta*. Accessed: Jul. 29, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- [3] D. Domri, R. Ridwan, and M. Jaya, “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Kabupaten*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2019.
- [4] Badan Pusat Statistik, “Data kemiskinan di Indonesia.”
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Program Keluarga Harapan (PKH).”
- [6] C. J. Supeno, H. Purnamasari, and R. Rahman, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, vol. 6, no. 4, pp. 2598–9944, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i4.3619.
- [7] R. Yulianti, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 2, pp. 114–121, Feb. 2020, Accessed: Jul. 29, 2025. [Online]. Available: <https://www.jurnal.stisipbp.ac.id/index.php/JIPE/article/view/109>
- [8] R. Muin and R. Rosdiana, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, vol. 5, no. 2, p. 130, 2020, doi: 10.35329/jalif.v5i2.1844.
- [9] E. Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [11] M. B. Miles and Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- [12] K. Williamson, L. M. Given, and P. Scifleet, “Qualitative data analysis,” *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition*, pp. 453–476, Jan. 2018, doi: 10.1016/B978-0-08-102220-7.00019-4.
- [13] N. Najidah and H. Lestari, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 8, no. 2, pp. 69–87, 2019.
- [14] K. Admosoeprapto, *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- [15] U. T. Astari and A. Pambudi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul,” *Journal of Public and Administration Research*, vol. 7, no. 5, pp. 692–705, 2018.

- [16] Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.”

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*